

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PERAWAT UNTUK MELAKUKAN
TINDAKAN PENYUNTIKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA
DI RUMAH SAKIT dr. R. SOETIJONO BLORA**

TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2**


**Program Studi Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan**



diajukan oleh

MU'AWANAH

NIM 09.93.0041

	PERPUSTAKAAN
NO. INV : 257 / 52 / MHK / C.1	
TGL : 18 Januari 2013	
PARAF : <i>Dr.</i>	

kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

Juli 2012

TESIS

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PERAWAT UNTUK MELAKUKAN
TINDAKAN PENYUNTIKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA
DI RUMAH SAKIT dr. R. SOETIJONO BLORA**

diajukan oleh

MU'AWANAH
NIM 09.93.0041

Telah disetujui oleh:

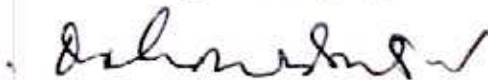
Pembimbing Utama



Valentinus Suroto, SH., M.Hum

tanggal.....

Pembimbing Pendamping



dr. Djoko Widarto JS, DHM., MH.Kes

tanggal.....

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: humas@unika.ac.id



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : MU'AWANAH

Nim : 09.93.0041

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Senin, 23 Juli 2012

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH

(.....)

2. Valentinus Suroto, SH.M Hum

(.....)

3. dr. Djoko Widyanto JS, DIIM., MH.Kes

(.....)

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Senin, 23 Juli 2012

(Prof. Dr. A. Widanti-S, SH., CN)

**Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum**

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Mu'awanah, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 09.93.0041,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 01 Maret 2012

MU'AWANAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia NYA yang telah melimpahkan nikmat dan rahmad NYA sehingga kami dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Implementasi Kewenangan Perawat untuk Melakukan Tindakan Penyuntikan dan Perlindungan Hukumnya Di Rumah Sakit dr. R. Soetijono Blora"

Tesis ini kami susun sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi tingkat kesarjanaan S-2 di Program Studi Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang.

Tak lupa rasa terima kasih peneliti ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, MSc., selaku direktur Pasca sarjana Universitas Khatolik Sugijapranata Semarang.
2. Bapak Dr. Ir. A. Rudyanto Soesilo, MSA., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Khatolik Sigijapranata Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. A. Widanti S, SH.,CN., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Sugijapranata Semarang.
4. Bapak Valentinus Suroto, SH., MHum., selaku pembimbing pertama yang di tengah-tengah kesibukan beliau masih meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan saran yang sangat berharga sehingga terselesainya tesis ini.

5. Bapak dr. Djoko Widyarto JS, DHM., MH.Kes., selaku pembimbing kedua yang di tengah-tengah kesibukan beliau masih meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan saran yang sangat berharga sehingga terselesainya tesis ini.
6. Bapak dr. Nugroho Adiwarsa, Sp. OG., selaku direktur Rumah Sakit dr. R. Soetijono Blora yang telah memberikan ijin untuk penelitian.
7. Teman-teman perawat dan dokter yang telah banyak memberikan masukan dan saran tentang penelitian ini.
8. Teman-teman angkatan XII Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Sugijapranata Semarang yang selalu kompak dan memberikan semangat sehingga terselesainya tesis ini.
9. Seluruh dosen Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universtas Khatolik Soegijapranata Semarang yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu atas dedikasinya dalam memberikan ilmu dan membuka cakrawala kami dalam bidang Hukum Kesehatan.
10. Seluruh staf administrasi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universtas Khatolik Soegijapranata Semarang yang telah membantu menyediakan semua fasilitas pendukung dalam kegiatan akademik sehingga perkuliahan terasa nyaman dan lancar.

11. Suamiku tercinta Heru Purnomo dan tiga putriku tersayang Najwa, Clairina, Fawnia yang selalu memberikan semangat dan inspirasi sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Peneliti merasa dalam penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan. Ijinkanlah peneliti mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada. Dan penelitian ini sebagai data awal untuk penelitian selanjutnya.



Semarang, Maret 2012

Peneliti

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Pembatasan Masalah.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penyajian Tesis.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pelayanan Kesehatan.....	20
B. Rumah Sakit.....	22

C. Tenaga Kesehatan.....	26
1. Dokter.....	28
2. Perawat.....	30
D. Kewenangan Perawat Dalam Tindakan Penyuntikan.....	34
E. Perlindungan Hukum Terhadap Perawat.....	41
F. Kerangka Pemikiran.....	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum Rumah Sakit dr. R. Soetijono Blora	45
2. Gambaran Umum Responden.....	49
3. Hasil Pelaksanaan Tindakan Penyuntikan yang Dilakukan oleh Perawat.....	50
4. Hasil Perlindungan Hukum Terhadap Perawat yang Melakukan Tindakan Penyuntikan.....	55
B. Pembahasan	
1. Pelaksanaan Kewenangan Tindakan Penyuntikan Yang Dilakukan Oleh Perawat di Rumah Sakit dr. R. Soetijono Blora.....	61
2. Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Yang Melakukan Tindakan Penyuntikan Yang Dilakukan Oleh Perawat Di Rumah Sakit dr. R. Soetijono Blora ...	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	83
---------------------	----

B. Saran..... 86

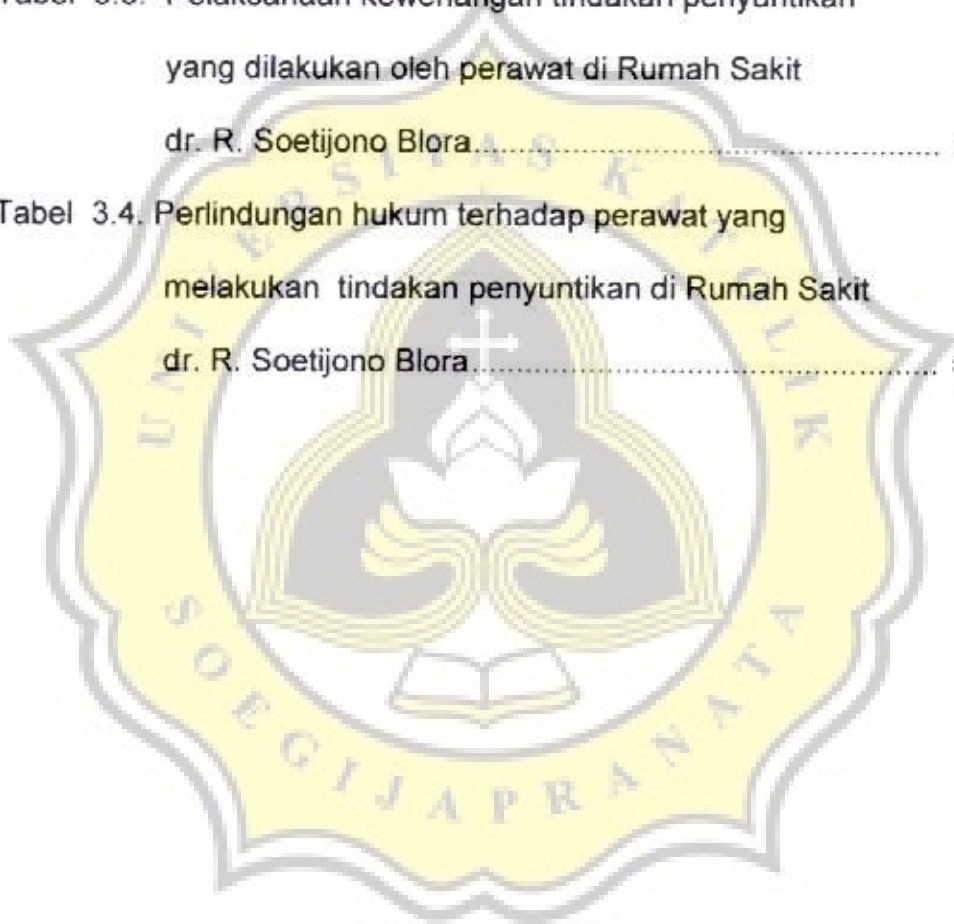
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 3.1. Jenis pelayanan Rumah Sakit dr. R. Soetijono Blora ...	48
Tabel 3.2. Jumlah dan kualifikasi pendidikan Tenaga Medis dan keperawatan Rumah Sakit dr. R. Soetijono Blora	49
Tabel 3.3. Pelaksanaan kewenangan tindakan penyuntikan yang dilakukan oleh perawat di Rumah Sakit dr. R. Soetijono Blora.....	50
Tabel 3.4. Perlindungan hukum terhadap perawat yang melakukan tindakan penyuntikan di Rumah Sakit dr. R. Soetijono Blora.....	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Desain Penelitian.....	Hal 11
Gambar 2 : Kerangka Pemikiran.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

1. Ijin Penelitian
2. SOP Tindakan Penyuntikan



ABSTRAK

Mu'awanah

Implementasi Kewenangan Perawat Untuk Melakukan Tindakan Penyuntikan Dan Perlindungan Hukumnya Di Rumah Sakit dr.R.Soetijono Blora

I-xiii, 87 halaman, 4 tabel, 2 gambar dan 2 lampiran

Sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara dokter dan perawat yang berawal dari pekerjaan sosial kemanusiaan menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Agar hal ini dapat terlaksana seharusnya dilengkapi dengan peraturan teknis pelaksanaan sehingga tenaga keperawatan mendapat perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kewenangan tindakan penyuntikan dan perlindungan hukumnya yang dilakukan oleh perawat di Rumah Sakit dr.R.Soetijono Blora.

Metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitiannya deskriptif analitik yaitu pemaparan dengan kata-kata secara terperinci tentang penerapan perundangan yang belum maksimal diRS dr.R.Soetijono Blora. Penarikan sampel purposive sampling, dengan kriteria 6 perawat dengan strata SI dan 3 dokter serta 9 rekam medik pada bulan Desember yang dilakukan tindakan penyuntikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di RS dr.R.Soetijono Blora dokter memberikan pelimpahan kewenangan kepada perawat sesuai dengan Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) Permenkes Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Perawat menerima pelimpahan kewenangan dari dokter sesuai Pasal 15 Kepmenkes Nomor 1239/MENKES/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat. Namun tidak ada formulir pelimpahan kewenangan secara tertulis, mereka menggunakan rekam medis sebagai sarannya. Kewenangan perawat dalam melakukan tindakan penyuntikan di Rumah Sakit dr.R.Soetijono Blora adalah kewenangan mandat. Perawat di RS dr.R.Soetijono Blora dalam melakukan tindakan penyuntikan berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Kata kunci : kewenangan perawat
Kepustakaan : 38 (1988-2011)

ABSTRACT

Implementation of the Authority of Nurses in Performing Injection Act and the Legal Protection at dr. R. Soetijono Hospital, Blora.

i-xiii, 87 pages, 4 tables, 2 pictures, and 2 enclosures

Nurse's and doctor's authority often face overlap that derives from a humanitarian social worker into a qualified professional healthcare worker. Expecting that this overlap happens, there should be technical implementation rules equipped so that the nurse will get legal protection in giving healthcare. The research objective is to see the implementation of the nurse's authority in performing injection and the legal protection to the nurse at dr. R. Soetijono Hospital, Blora.

The approach applied is sociologically juridical whereas the research specification is analytically descriptive that is detailed literary exposure about the legislation implementation at dr. R. Soetijono, Blora, that remains not maximum. The sampling is done purposively, that is 6 nurses having S-1 and D-3 educational background, 3 doctors, and 9 medical records showing that there were injection acts in December.

The research results show that the doctors of dr. R. Soetijono, Blora, give the delegation of authority to the nurses in accordance with article 23 paragraph (1), (2), and (3) of the Regulation of Minister of Health (Permenkes) Nr. 2052/MENKES/PER/X/2011 on Medical Practice Permit and Practice Performance. A nurse receives an authority delegation from the doctor or physician in accordance with article 15 of the Decree of the Minister of Health (Kepmenkes) Nr. 1239/MENKES/XI/2001 on Nurse's Registration and Practices. There is no written form of the authority delegation but they use a medical record as a note to be documented. Seeing the fact, a nurse's authority in performing injection at dr. R. Soetijono, Blora, is a mandated authority. Therefore, in performing injection, a nurse of dr. R. Soetijono, Blora, is entitled a legal protection.

Keyword: nurse's authority

Bibliography: 38 (1988-2011)